

## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI RIAU

### Economic Growth and Regional Inequality in Riau Province

Sisca Vaulina dan Limetry Liana

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau

Jl. Khaharuddin Nasution No.113 Pekanbaru. 28284

Telp: 0761-674681; Fax: 0761-674681

[Diterima Juli 2015; Disetujui November 2015]

#### ABSTRACT

The purpose this research is to highlight the economic growth and the inequality level across regions in Riau province. This research used case method and time series data for 2010-2014. The data were analyzed using economic growth from Typology Klassen, Williamson inequality index, and Theil Entropy Index. The results showed that based on the typology Klassen, the economic growth in Riau Province is located in Quadrant I. This means that Riau Province is a province which is included in the group of advanced and fast growing region. Based on Williamson index, Riau Province from the year 2010-2014 had inequality with a range of 0.727 to 0.960 and high inequality criterion or the average index of inequality was 0,862. Although the criteria were high inequality, the index value decreased during the analysis. Based on Enthropi Theil index, the index value was an average of 0.204. During the period 2010-2014, the declining trend of the index value was seemed at the beginning in 2013. The decreasing inequality was caused by the concentration of economic activities in certain region, equitable allocation of investment, and mobility of production factors between regions.

**Keywords:** *Economic growth, Inequality region, Indexs Williamson, Tipologi Klassen*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 2010-2014. Data dianalisis dengan menggunakan analisis pertumbuhan ekonomi Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan hasil tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terletak pada Kuadran I, ini artinya bahwa Provinsi Riau merupakan propinsi yang termasuk pada kelompok daerah maju dan cepat tumbuh. Berdasarkan perhitungan indek Williamson, Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki ketimpangan dengan kisaran 0,727-0,960 dengan kriteria ketimpangan tinggi atau rata-rata indeks ketimpangan 0,862. Meskipun kriteria ketimpangan tinggi, namun nilai dari indeks tersebut mengalami penurunan selama tahun analisis. Berdasarkan indeks Enthropi Theil, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks 0,204. Selama periode 2010-2014, ada kecenderungan penurunan nilai indeks yang dimulai pada tahun 2013. Adanya ketimpangan yang menurun disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata dan tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah.

**Kata Kunci:** *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah Indexs Williamson, Tipologi Klassen*

#### PENDAHULUAN

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi

tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan

karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi serta tenaga kerja yang terampil. Disamping itu, adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah (Kuncoro, 2004).

Kurniasih (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga output juga meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan per kapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan disuatu daerah menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses penetasan ke bawah (*trickling down effect*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah inti dalam suatu wilayah (Yang *et*

*al.*, 2012). Banyak literatur yang memfokuskan pada ketimpangan nasional saja, tetapi ketimpangan wilayah juga penting (Glaeser *et al.*, 2009). Sjafrizal (2009) mengemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal, antara lain: perbedaan potensi daerah yang sangat besar, kondisi demografis dan ketenagakerjaan, serta kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu, kurang lancarnya mobilitas antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*), salah satunya di Provinsi Riau.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Sehingga, peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan kebijakannya. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya ketimpangan wilayah antar kabupaten. Laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan tingkat yang beragam dan akan berdampak kepada ketimpangan regional (Tabel 1).

Pada Tabel 1, memperlihatkan bahwa daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Provinsi ternyata memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun ada juga daerah

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita (Juta Rp)
1	Kuantan Singingi	5,34	65,57
2	Indragiri Hulu	5,75	64,80
3	Indragiri Hilir	6,92	53,52
4	Pelalawan	6,16	75,58
5	Siak	4,70	88,26
6	Kampar	4,56	46,12
7	Rokan Hulu	6,47	35,11
8	Bengkalis	7,33	67,57
9	Rokan Hilir	6,19	49,88
10	Kepulauan Meranti	7,52	50,29
11	Pekanbaru	6,79	53,97
12	Dumai	3,25	44,62
	Riau	5,90	56,78

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2015

dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah sekaligus memiliki pendapatan per kapita yang rendah dari Propinsi seperti Kota Dumai dan Kabupaten Kampar.

Secara keseluruhan pendapatan per kapita antar kabupaten di Provinsi Riau tidak begitu tinggi, hanya beberapa daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan merupakan daerah perkotaan (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis). Secara tak langsung hal ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau relatif lebih baik. Namun ini juga dapat mencerminkan bahwa pembangunan di Provinsi Riau lebih terfokus pada daerah-daerah tertentu terutama daerah kota yang merupakan konsentrasi penduduk di Riau. Disisi lain terpusatnya pembangunan di daerah perkotaan menyebabkan perbedaan antara daerah semakin menyolok dan berujung pada perbedaan kesejahteraan masyarakat antar daerah.

Ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau bisa saja terjadi karena perbedaan besar terhadap kontribusi sektor unggulan, perbedaan potensi daerah misalnya perbedaan sumberdaya alam di Provinsi Riau. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2010-2014, yakni data PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk. Data diperoleh dari BPS Provinsi Riau, perpustakaan, jurnal ilmiah, internet, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan kajian yang dilakukan.

*Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) digunakan sebagai salah satu data yang memperlihatkan kondisi pertumbuhan ekonomi antar satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu kabupaten. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka pertumbuhan ekonominya dianggap semakin tinggi. Tidak semua pertumbuhan ekonomi

diikuti oleh distribusi pendapatan per kapita. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dalam suatu wilayah.

## **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipologi Klassen**

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan klasifikasi tiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan sepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Aswandi dan Kuncoro, 2002).

Menurut Sjafrizal (1997) dan Kuncoro (2004), analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita (PDRB per kapita) sebagai sumbu horizontal, daerah dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

Kuadran I:

Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB di kabupaten/kota (*gi*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah di Provinsi Riau (*g*) dan memiliki pertumbuhan ekonomi (*si*) yang lebih besar dibandingkan Provinsi Riau (*s*). Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

**Kuadran II:**

Sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada kuadran ini kabupaten/kota memiliki nilai PDRB (*gi*) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau (*g*), tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi (*si*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (*s*). Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

**Kuadran III :**

Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (*gi*) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau (*g*), tetapi pertumbuhan ekonomi (*si*) lebih kecil dibandingkan di Provinsi Riau (*s*). Sektor ini dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

**Kuadran IV :**

Sektor relatif tertinggal. Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (*gi*) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau (*g*) dan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi (*si*) yang lebih kecil dibandingkan di Provinsi Riau (*s*).

**Ketimpangan Wilayah**

Untuk menentukan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Riau, pada penelitian ini menggunakan dua rumus indeks ketimpangan wilayah, yakni indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil. Menurut Sutarno (2003), perbedaan pada dua perhitungan ini adalah pada Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten di satu provinsi tanpa menjelaskan

seberapa besar PDRB per kapita terdistribusi ke PDRB per kapita untuk daerah lain. Sementara itu, Indeks Entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Indeks dari Jeffery G. Williamson atau indeks ketimpangan Williamson, dengan rumus (Sjafrizal, 1997):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y<sub>i</sub> = PDRB per Kapita di kabupaten/kota *i*
- Y = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Riau
- F<sub>i</sub> = Jumlah penduduk di kabupaten/kota *i* di Provinsi Riau
- n = Jumlah penduduk Provinsi Riau

Adapun kriteria hasil yang digunakan adalah:

- Indeks > 1 = Ketimpangan sangat tinggi
- Indeks 0,7 – 1 = Ketimpangan tinggi
- Indeks 0,4 – 0,69 = Ketimpangan sedang
- Indeks < 0,39 = Ketimpangan rendah

**Indeks Entropi Theil**

$$I_{theil} = \sum (y_i/Y) \times \log [(y_i/Y)/(x_i/X)] \dots\dots (2)$$

Keterangan:

- I<sub>theil</sub> = Indeks entropi theil
- y<sub>i</sub> = PDRB per kapita kabupaten/kotak *i*
- Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Riau
- x<sub>i</sub> = Jumlah penduduk kabupaten/kota *i*
- X = Jumlah penduduk Provinsi Riau

Nilai indeks Entropi Theil = 0 artinya pemerataan sempurna dan bila indeks semakin

Tabel 2. Matriks Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen

PDRB per kapita ( <i>g</i> )		
Pertumbuhan ekonomi ( <i>s</i> )	<i>g<sub>i</sub></i> ≥ <i>g</i>	<i>g<sub>i</sub></i> < <i>g</i>
<i>s<sub>i</sub></i> ≥ <i>s</i>	Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan
<i>s<sub>i</sub></i> < <i>s</i>	Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal

Keterangan: *g<sub>i</sub>* = PDRB per kapita kabupaten atau kota ke *i*  
*g* = PDRB per kapita Provinsi Riau  
*s<sub>i</sub>* = Pertumbuhan ekonomikabupaten atau kota ke *i*  
*s* = Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang semakin besar (Kuncoro, 2004). Kelebihan indeks Entropi Theil yaitu dapat didekomposisi menjadi ketimpangan dalam kelompok itu sendiri (*Within-Group*) dan ketimpangan antar kelompok itu (*Between-Group*). Dengan demikian kita dapat mengamati dengan lebih jelas bagaimana fenomena ketimpangan terjadi dalam suatu distribusi pendapatan. Meskipun mampu memberikan gambaran kondisi ketimpangan yang ada, indeks Entropi Theil tidak mampu memecahkan permasalahan instrinsik yang ada dalam ketimpangan pendapatan regional (Akita, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi Tipologi Klassen

Menurut Tarigan (2007), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan).

Kegiatan pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari setidaknya tiga unsur utama. Pertama, unsur potensi atau kekayaan daerah sebagai modal dasar pembangunan. Kedua, unsur pemerintah daerah sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana kegiatan ekonomi daerah. Ketiga, unsur swasta sebagai mitra

pemerintah atau sebagai *stakeholders* kegiatan ekonomi daerah. Ketiganya akan menentukan arah dan proses pembangunan ekonomi pada daerahnya masing-masing (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Riau digunakan analisis tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan klasifikasi tiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terletak pada Kuadran I, ini artinya bahwa Provinsi Riau merupakan propinsi yang termasuk pada kelompok daerah maju dan cepat tumbuh. Sementara itu, perhitungan tipologi Klassen berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk pada kuadran I kategori daerah maju dan cepat tumbuh (Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru); Kuadran II, daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir); Kuadran III, daerah potensial atau masih dapat berkembang pesat (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai) (Gambar 2).

Selanjutnya, pada Gambar 2 terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Riau terbanyak pada kuadran III, sedangkan untuk kuadran IV (daerah relatif tertinggal) tidak ada kabupaten/kota termasuk kategori ini. Kabupaten Kampar

Tabel 3. Klasifikasi dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Tipologi Klassen di Provinsi Riau, Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Daerah maju dan cepat tumbuh	Daerah maju tapi tertekan	Daerah potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Daerah relatif tertinggal
1	Kuantan Singingi	-	-	✓	-
2	Indragiri Hulu	-	-	✓	-
3	Indragiri Hilir	-	-	✓	-
4	Pelalawan	-	-	✓	-
5	Siak	-	✓	-	-
6	Kampar	✓	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	✓	-
8	Bengkalis	-	✓	-	-
9	Rokan Hilir	-	✓	-	-
10	Kepulauan Meranti	-	-	✓	-
11	Pekanbaru	✓	-	-	-
12	Dumai	-	-	✓	-

dan Kota Pekanbaru (Kuadran I) memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Riau secara keseluruhan. Pada dasarnya kabupaten dan kota ini merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat setempat. Daerah ini akan terus berkembang dimasa yang akan datang.

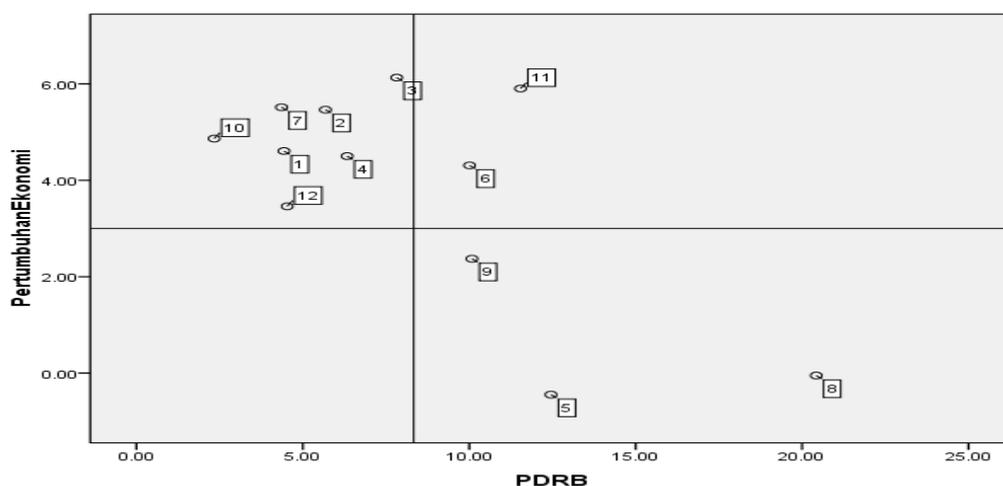
Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir (Kuadran II), kabupaten ini memiliki nilai pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan propinsi, tetapi memiliki kontribusi PDRB kabupaten yang lebih besar dibandingkan kontribusi propinsi. Daerah ini merupakan daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju perumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Walaupun daerah ini merupakan daerah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai (Kuadran III) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai potensi sumber daya alam, juga mampu mempertahankan basis ekonomi yang kuat sebagai pendukung sektor lain dalam pertumbuhan perekonomian. Kabupaten ini telah mendapat perhatian yang optimal dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan pesat.

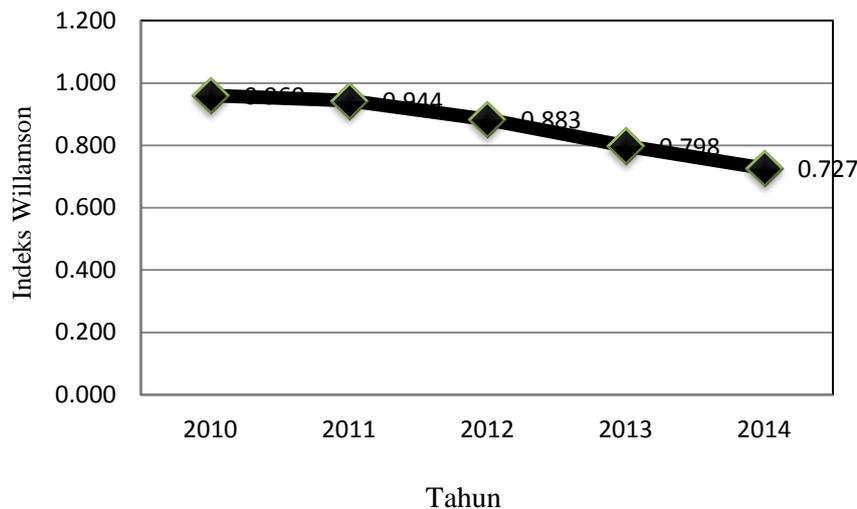
Pembangunan yang telah dicapai masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ke depan, kabupaten/kota diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Berdasarkan hasil penelitian Mopangga (2011), pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu, adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.



Gambar 2. Pola dan Struktur Ekonomi Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Riau Tahun 2015

Keterangan: (1) Kabupaten Kuantan Singingi (2) Kabupaten Indragiri Hulu (3) Kabupaten Indargiri Hilir (4) Kabupaten Pelalawan (5) Kabupaten Siak (6) Kabupaten Kampar (7) Kabupaten Rokan Hulu (8) Kabupaten Bengkalis (9) Kabupaten Rokan Hilir (10) Kabupaten Kepulauan Meranti (11) Kota Pekanbaru (12) Kota Dumai



Gambar 3. Nilai Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2010-2014

### Ketimpangan Wilayah Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan komponen masyarakat di suatu daerah. Ketimpangan merupakan dampak dari pembangunan. Perbedaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki setiap kabupaten/kota membuat setiap daerah memiliki kebijakan untuk memajukan perekonomian di daerahnya, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Yunisti (2012), dampak positif dari ketimpangan wilayah adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya agar meningkatkan kesejahteraannya dan juga mendorong mobilitasi tenaga kerja dari wilayah yang tinggi ketimpangannya ke daerah dengan ketimpangan rendah.

Todaro (2004), dampak negatif ketimpangan adalah inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Semakin besar nilai Indeks Williamson, maka semakin besar ketidakmerataan antar daerah dan sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Williamson, maka tingkat ketidakmerataan antar daerah juga akan semakin kecil. Berdasarkan perhitungan indeks Williamson (Gambar 3), dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki ketimpangan dengan kisaran 0,727-0,960 dengan kriteria ketimpangan tinggi atau rata-rata indeks ketimpangan 0,862. Meskipun kriteria ketimpangan tinggi, namun

nilai dari indeks tersebut mengalami penurunan selama tahun analisis.

Tingginya nilai ketimpangan di Provinsi Riau, salah satunya disebabkan dari jumlah absolut PDRB per kapita sehingga adanya celah (gap) yang cukup besar. Selain itu, keadaan infrastruktur yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan penelitian Nurhuda *dkk* (2012), ketimpangan di Provinsi Jawa Timur berasal dari perbedaan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah, khususnya di wilayah kota dan wilayah kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian Fleisher *et al.* (2007), menyarankan bahwa pemerintah meningkatkan upaya untuk mengembangkan ekonomi secara merata disemua daerah, bukan hanya di provinsi diwilayah masing-masing.

Berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau, nilai indeks Williamson memiliki kriteria yang bervariasi dimulai dari kriteria ketimpangan sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Dilihat dari rata-rata, kriteria ketimpangan sangat tinggi, terdapat di Kabupaten Bengkalis (3,503), Kabupaten Siak (1,809), Kabupaten Rokan Hulu (1,302), dan Kota Pekanbaru (1,013). Ketimpangan dengan kategori tinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (0,952); ketimpangan dengan kategori sedang terdapat di Kabupaten Kampar (0,602) dan ketimpangan dengan kategori rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (0,339), Kabupaten Indragiri Hulu (0,295), Kabupaten Kuantan Singingi (0,281), Kabupaten Pelalawan (0,157), Kabupa-

ten Rokan Hilir (0,072) dan Kota Dumai (0,022). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada Indeks Williamson, PDRB per kapita sebagai salah satu sumber ketimpangan di Provinsi Riau. Peningkatan nilai PDRB per kapita akan mengurangi ketimpangan pembangunan setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, untuk mengatasi ketimpangan yang ada, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB per kapita setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau.

### Ketimpangan Wilayah Indeks Entropi Theil

Selain menggunakan indeks Williamson, indeks Entropy Theil dapat juga digunakan untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi dimasing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. Bila nilai indeks Entropi Theil = 0 maka pemerataan sempurna dan bila indeks semakin menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang semakin besar yang artinya daerah yang memiliki nilai indeks Entropi Theil yang semakin tinggi dikategorikan sebagai daerah yang semakin timpang pembangunannya. Barika (2012), Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri.

Berdasarkan *indeks Entropi Theil*, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks 0,204. Selama periode 2010-2014 adanya kecenderungan penurunan nilai indeks yang dimulai pada tahun 2013. Adanya ketimpangan

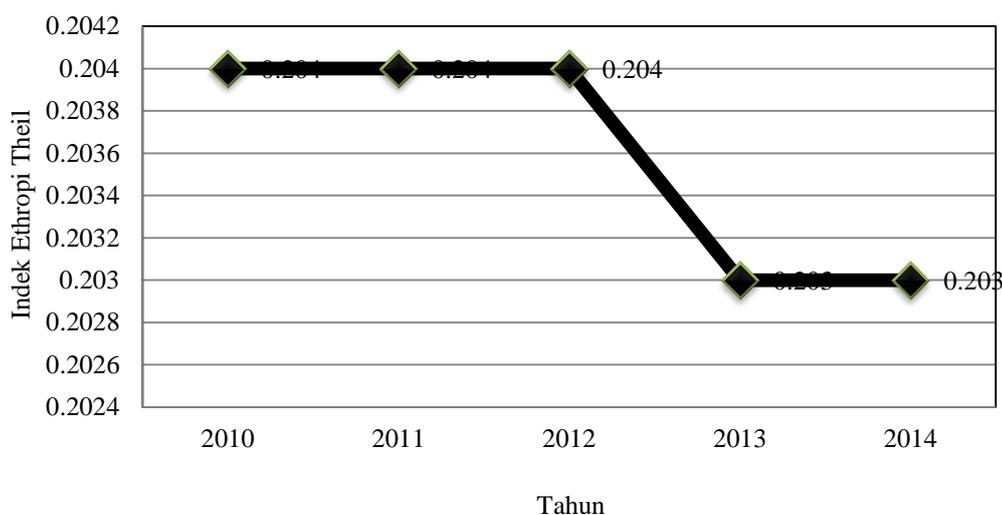
yang menurun disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata, serta tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2010-2014 berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa nilai indeks Entropi Theil terbesar berada di Kabupaten Bengkalis dengan nilai 0,513 dan nilai terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apabila suatu kabupaten/kota memiliki Indeks Entropi Theil yang semakin besar menunjukkan terjadinya ketimpangan/disparitas yang semakin besar pula. Sebaliknya, apabila suatu kabupaten/kota memiliki nilai Indeks Entropi Theil yang semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah pula atau semakin merata. Secara rinci disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai Indeks Entropi Theil bervariasi dengan kisaran 0,082-0,513. Perbedaan tingkat kesenjangan yang ditunjukkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau ini menunjukkan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan yang terjadi dimasing-masing kabupaten/kota. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan nilai Entropi Theil yakni perbedaan sumber daya alam antar wilayah, kondisi kependudukan, perbedaan kondisi geografis antar wilayah serta mobilitas perdagangan antar kabupaten/kota ke provinsi.

Tabel 4. Nilai Indeks Williamson Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Williamson						Kriteria Ketimpangan
		2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata	
1	Kuantan Singingi	0.364	0.332	0.305	0.234	0.171	0.281	Rendah
2	Indragiri Hulu	0.396	0.372	0.308	0.231	0.171	0.295	Rendah
3	Indragiri Hilir	1.145	1.084	0.960	0.840	0.731	0.952	Tinggi
4	Pelalawan	0.243	0.149	0.121	0.130	0.143	0.157	Rendah
5	Siak	2.149	1.923	1.845	1.634	1.493	1.809	Sangat Tinggi
6	Kampar	0.639	0.658	0.632	0.545	0.538	0.602	Sedang
7	Rokan Hulu	1.279	1.324	1.316	1.304	1.289	1.302	Sangat Tinggi
8	Bengkalis	3.618	3.923	3.642	3.323	3.008	3.503	Sangat Tinggi
9	Rokan Hilir	0.079	0.058	0.077	0.084	0.061	0.072	Rendah
10	Kepulauan Meranti	0.444	0.388	0.331	0.288	0.242	0.339	Rendah
11	Pekanbaru	1.138	1.091	1.025	0.950	0.860	1.013	Sangat Tinggi
12	Dumai	0.031	0.023	0.036	0.007	0.012	0.022	Rendah



Gambar 4. Nilai Indeks Entropi Theil Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Pada penelitian Mopangga (2011), tingkat ketimpangan yang tercipta di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas cenderung mengarah pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita diikuti oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kemudahan dalam mengakses infrastruktur. Daerah dengan konsentrasi penduduk tinggi dan kantong-kantong

kemiskinan menjadi prioritas. Easterly (2007), ketimpangan juga mempengaruhi hasil pembangunan lainnya, seperti lembaga dan sekolah.

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan yang tinggi, pembangunan

Tabel 5. Nilai Indeks Entropi Theil Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Entropi Theil					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kuantan Singingi	0.126	0.126	0.128	0.133	0.137	0.130
2	Indragiri Hulu	0.146	0.147	0.153	0.159	0.163	0.153
3	Indragiri Hilir	0.153	0.158	0.166	0.174	0.182	0.167
4	Pelalawan	0.178	0.176	0.175	0.178	0.182	0.178
5	Siak	0.363	0.343	0.337	0.320	0.308	0.334
6	Kampar	0.203	0.202	0.205	0.212	0.213	0.207
7	Rokan Hulu	0.101	0.101	0.103	0.106	0.109	0.104
8	Bengkalis	0.529	0.549	0.524	0.496	0.467	0.513
9	Rokan Hilir	0.237	0.226	0.225	0.224	0.227	0.228
10	Kepulauan Meranti	0.077	0.079	0.082	0.084	0.086	0.082
11	Pekanbaru	0.195	0.200	0.207	0.214	0.222	0.208
12	Dumai	0.139	0.139	0.138	0.140	0.141	0.139

daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Raswita dan Made, 2010).

## KESIMPULAN

1. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk pada kuadran I kategori daerah maju dan cepat tumbuh (Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru); Kuadran II, daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir); Kuadran III, daerah potensial atau masih dapat berkembang pesat (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai).
2. Berdasarkan pada nilai indeks Williamson, kriteria ketimpangan sangat tinggi, terdapat di Kabupaten Bengkalis (3,503), Kabupaten Siak (1,809), Kabupaten Rokan Hulu (1,302), dan Kota Pekanbaru (1,013). Ketimpangan dengan kategori tinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (0,952); ketimpangan dengan kategori sedang terdapat di Kabupaten Kampar (0,602) dan ketimpangan dengan kategori rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (0,339), Kabupaten Indragiri Hulu (0,295), Kabupaten Kuantan Singingi (0,281), Kabupaten Pelalawan (0,157), Kabupaten Rokan Hilir (0,072) dan Kota Dumai (0,022).
3. Nilai *indeks Entropi Theil* terbesar berada di Kabupaten Bengkalis dengan nilai 0,513 dan nilai terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Saran

Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya agar lebih memprioritaskan pada daerah yang maju tapi tertekan (Kuadran II). Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur agar lebih merata pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau serta menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T. 2003. Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method. *The Annals of Regional Science*. Springer-Verlag.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke Empat. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Aswandi, H dan M. Kuncoro. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(1): 27-45.
- Barika. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005–2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 4(3): 1-11
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. *Riau dalam Angka*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2011. *Riau dalam Angka*. Pekanbaru.
- Bakce, D. PERILAKU KONSUMSI PANGAN POKOK OLEH RUMAHTANGGA DI PROVINSI RIAU.
- Easterly, W. 2007. Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights From a New Instrument. *Journal of Development Economics*, 84: 755–776.
- Fleisher, B., H. Li., and M. Q. Zhao. 2007. Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. Discussion Paper No. 2703 March 2007. IZA DP No. 2703
- Glaeser, E. L., M. Ressenger, and K. Tobio. 2009. Inequality in Cities. *Journal of Regional Science*, 49(4): 617-646
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Kurniasih, E. P. 2013. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, 9(1): 36-48.
- Nurhuda, R., M. R. K. Muluk., dan W. Y. Prasetyo. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4):110-119

- Mopangga, H. 2011. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Trikonon-mika*, 10(1): 40-51
- Raswita, N. P. M. E., dan M. S. Utama. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 2(3): 119-128.
- Sjafrizal. 2009. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media, Padang.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, 26(3).
- Sutarno, M. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2): 97-110.
- Tarigan, R. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Keempat. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, M. P. 2004. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Yang, W., F. Chuanglin, X. Chunliang, and L. Daqian. 2012. A New Approach to Measurement of Regional Inequality in Particular Directions. *Chin, Geogra, Sci*, 22(6): 705-717
- Yin, R. K. 1984. *Case Study Research: Design and Methods*. Newbury Park, Sage, CA.
- Yusnita, T. D. 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Tesis Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta (Tidak dipublikasikan).

